PGRI Bantu Korban Kebakaran di Gedangsari

KR-Dedy EW

Penyerahan bantuan untuk korban kebakaran.

WONOSARI (KR) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Dinas Pendidikan Gunungkidul menyerahkan bantuan peduli korban kebakaran. Bantuan menyasar keluarga Ny Wagini Pendidik PAUD Syifaíul Qulub di Manggung, Ngalang, Gedangsari Gunungkidul. Kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis (23/3) lalu atau 1 Ramadhan 1444 H bertepatan dengan waktu sholat subuh. Kebakaran itu disebabkan korsleting listrik dan satu rumah terbakar habis. "Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban korban kebakaran," kata Ketua PGRI Gunungkidul Tijan SSos MM, Selasa (11/4).

Bantuan diserahkan Ketua PGRI Tijan SSos didampingi Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati, SPd MM dan pengurus PGRI. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati MM menyampaikan ucapan keprihatinan atas musibah yang dialami Ibu Wagini dan keluarga. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Serta mudah-mudahan bantuan yang diberikan memberikan manfaat. Sementara itu Ny Wagini mengucapkan terima kasih kepada PGRI dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya. "Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan Allah membalas kebaikan yang sudah bapak ibu berikan," ujarnya. **(Ded)**

Diserahkan Bantuan Beras Pemerintah 18 Kapanewon

KR-Bambang Purwanto

Bupati H Sunaryanta serahkan bantuan beras pemerintah di Saptosari

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 di Kapanewon Saptosari dan Paliyan, Senin (10/4). Penyerahan perdana dilaksanakan di Kalurahan Jetis Saptosari, Kalurahan Grogol, Karang Duwet, Giring, Sodo Kapanewon Paliyan." Terdapat 104.760 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 18 kecamatan se Gunungkidul yang akan menerima bantuan ini dengan total bantuan beras mencapai 1.047.600 Kilogram," terang H Sunaryanta.

Adapun bantuan pangan CBP tersebut merupakan program dari Badan Pangan Nasional. Petunjuk penyaluran bantuan berpedoman pada Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023.

Setiap Keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 Kilogram. Bantuan pangan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat penerima manfaat, sekaligus menjadi langkah konkrit dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat."Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik dan jangan dijual," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan, Bidang Ketahanan Pangam ditunjuk langsung oleh Badan Pangan Nasional untuk melakukan monitoring pembelian bantuan. **(Bmp)**

PAN MULAI PENDAFTARAN BACALEG
Pemilu 2024, Targetkan Raih 9 Kursi

KR-Dedy EW

Supriyana menyampaikan keterangan pers.

WONOSARI (KR) - DPD PAN Gunungkidul memulai membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) mulai, Rabu (12/4) hingga Selasa (25/4) mendatang. Hal ini untuk menghadapi jadwal tahapan pemilu di KPU yang pada awal Mei sudah dilakjukan pendaftaran bacaleg. " Pembukaan bacaleg ini terbuka baik bagi pengurus, kader maupun tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pendaftaran di KPU dijadwalkan akan dilaksanakan pada, Jumat 12 Mei mendatang," kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD PAN Gunungkidul Supriyana AMd di dampingi Sekretaris Edi Susilo SIP dan Divisi Pencalegan Subagyo di Kantor DPD PAN, Selasa (11/4).

Diungkapkan, KPPD DPD PAN Gunungkidul melakukan strategi dan implementasi pemenangan pemilu 2024. Termasuk di dalamnya proses komunikasi penjaringan bacaleg, penyiapan bacaleg pada tiap dapi, dan syarat administrasi sampai pendaftaran di KPU Gunungkidul. Pada pemilu 2024, DPD PAN Gunungkidul mentargetkan meraih 9 kursi di DPRD Gunungkidul dan 2 kursi di DPRD DIY. " Untuk KPPD Divisi pencalegan berjumlah 7 orang, ditambah ketua dan sekretaris. Sehingga totalnya sebanyak 9 orang. Bahkan juga sudah secara intensif menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha dan pensiunan ASN," jelasnya. **(Ded)**

PARTAI UMMAT DIY
Targetkan Bisa Bentuk Fraksi Sendiri

KR-Asrul Sani

Burhani Arwin (kiri) dan Hanafi Rais menghadiri upgrading di Pengasih.

PENGASIH (KR) - Untuk meningkatkan kapasitas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/ kota di DIY, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY menggelar roadshow. Partai Ummat DIY menargetkan meraih kemenangan dan bisa membentuk fraksi sendiri di setiap kabupaten pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sebelumnya kami mengadakan *upgrading* di Sleman dan Yogyakarta, sekarang di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. *Upgrading* meningkatkan kapasitas DPC dalam pemenangan Pemilu 2024 mendatang," kata Ketua DPW Partai Ummat DIY Dwi Kuswantoro di RM Mbah Karyo Pedukuhan Ngramang Kalurahan Kedungsari, Pengasih Kulonprogo, DIY, belum lama ini.

Diungkapkan, *upgrading* salah satu langkah pemanasan mesin partai dan menghadirkan beberapa tokoh seperti Ketua KPU Kulonprogo Ibah Muthiah, mantan anggota DPR RI Hanafi Rais, dua mantan Ketua DPD PAN Kulonprogo Sudarminto dan Kasdiyono serta motivator. "Tokoh-tokoh masyarakat tersebut siap berkhidmat bersama Partai Ummat," jelas Dwi.

Untuk memaksimalkan jaringan generasi muda, Partai Ummat melaksanakan Gerakan Kewirausahaan 'Kulonprogo Obah'. Gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi di DIY agar masyarakat sejahtera. "Ada dua masalah serius yang dihadapi DIY, yakni masalah kemiskinan dan gini ratio tinggi. Nah melalui Kulonprogo Obah masalah tersebut bisa teratasi," tuturnya. **(Rul)**

HADAPI KEDATANGAN PEMUDIK
Pemkab Siapkan 3 Pos Pengamanan Utama

WONOSARI (KR) - Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai antisipasi menghadapi kedatangan pemudik lebaran dari berbagai kota besar yang diprediksi akan terjadi pada 19 -21 April 2023 mendatang. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan tiga pos di sejumlah titik di Gunungkidul.

Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Bayu Susilo Aji, mengatakan diprediksi pada arus mudik tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Hal itu mengingat provinsi DIY menjadi daerah tujuan perjalanan terbanyak pada lebaran tahun ini. "Dari hasil koordinasi secara nasional di DIY akan kedatangan 5,9 juta pemudik," katanya, Selasa (11/4).

Dari estimasi yang dilakukan Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah tujuan terbanyak kedua di DIY, yakni sebanyak 4,78 perse dari pemudik nasional akan menuju ke Kabupaten Gunungkidul. Terkait hal tersebut pihaknya akan menyiapkan tiga pos yang meliputi posko induk, pos pelayanan angkutan dan pos Pengamanan jalur wisata untuk mendukung kelancaran arus mudik tersebut. Selain itu saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan dan pemenuhan pelayanan fasilitas jalan seperti memperbaiki serta pemasangan fasilitas jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum baik di jalan utama arus mudik maupun jalan-jalan kabupaten. "Tahun ini jumlah pemudik mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya mencapai 300 ribu pemudik," ujarnya.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan pemeriksaan rampcek untuk memastikan kondisi kendaraan dan kesiapan kendaraan angkutan barang dan penumpang dengan sasaran pool bus, terminal, ruas-ruas jalan utama masuk ke Gunungkidul dan ruas jalan perkotaan. Ramp chek kendaraan sangat penting untuk memastikan kendaraan angkutan benar-benar laik jalan dan dalam kondisi siap melayani penumpang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan yang disebabkan karena kondisi kendaraan. "Dalam waktu dekat, ramp chek kendaraan angkutan akan dilakukan," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto juga memprediksi tahun ini volume kendaraan pemudik akan mengalami peningkatan karena dampak pandemi Covid-19 sudah berangsur normal dan terkendali. **(Bmp)**

PEMKAB KULONPROGO ALOKASIKAN
Jaminan Kesehatan PBI Rp 23,5 M

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengalokasikan untuk Jaminan Kesehatan Daerah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD 2023 sebesar Rp 23,5 Miliar.

"Terkait Jaminan kesehatan ini, Kulonprogo sudah menerima UHC Award, artinya Kulonprogo memenuhi syarat 95 persen dan kita ada 97,5 persen yang sudah memiliki jaminan kesehatan," terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dr Sri Budi Utami MKes, Selasa (11/4).

Dijelaskan Sri Budi, masih ada 2,5 persen dari total penduduk, sekitar 11 ribu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.

"Untuk 11 ribu ini kita harus cek, apakah kaya atau miskin. Artinya kalau mereka mampu, harapan kami, masyarakat harus didorong menjadi peserta mandiri. Kalau kondisi tidak mampu/miskin akan masuk PBI, bisa dari APBN atau APBD," ujarnya.

Pihaknya, kata Sri Budi juga perlu mensosialisasi Perbup yang disusun, bagaimana langkah-langkah untuk dapat menerima, mendapat haknya menjadi peserta JKN PBI APBD itu semakin hari semakin banyak. Bila kemarin sebulan 100, 200, sekarang sudah 800 sampai 1.000. Sehingga harus cermat, apakah yang dimaksudkan memenuhi syarat atau tidak, karena prinsipnya sesuai ketentuan.

Dijelaskan, untuk migrasi mandiri ke PBI, memang ada sekelompok masyarakat yang karena kondisi tertentu, dahulu mampu karena bekerja dan menjadi peserta JKN Mandiri, tetapi oleh karena suatu hal tidak mampu lagi bayar. Ini bisa dibantu, tapi harus melalui klarifikasi.

"Seperti langkah pengajuan di PBI APBD, dimulai dari Kalurahan. Ada konfirmasi dari lurah, terkait kondisi ekonomi peserta tadi. Sehingga langkahnya sama dari kalurahan ada surat rekomendasi, kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi. Kalau memenuhi syarat maka nama tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan meneruskan ke BPJS Kesehatan agar dimasukkan ke JKN PBI," ucap Sri Budi sambil menyatakan saat ini jumlah warga yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan PBI yang dibayarkan sebanyak 37.000 peserta, yang paling banyak tetap dari APBN ada 60 persen, PBI, pemberi kerja dan mandiri. **(Wid)**